

## **SALURAN KEUANGAN ALTERNATIF BAGI KELOMPOK MISKIN DI PERDESAAN**

**Deni Mukbar**

AKATIGA, *Center for Social Analysis*  
Jl. Tubagus Ismail II/2 Bandung 40134  
e-mail: dienim@gmail.com

**ABSTRAK.** Artikel ini membahas persoalan keuangan dan alternatif lembaga keuangan yang mudah, murah, dan cepat bagi kelompok masyarakat miskin di perdesaan Jawa yang berkarakter pertanian sawah dan berada di tepi jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode etnografis disertai survei dengan kuesioner dan analisis data sekunder. Selain itu dilakukan pula wawancara mendalam terhadap informan terpilih dan pengamatan terstruktur pada berbagai aktivitas sehari-hari penduduk sebagai bagian dari strategi triangulasi. Berbagai lembaga keuangan, baik formal maupun non-formal, sebenarnya sudah banyak tersebar hingga ke pelosok perdesaan. Namun, dalam kenyataannya belum memberikan manfaat bagi kelompok miskin; keberadaan lembaga-lembaga keuangan formal lebih banyak diakses oleh rumah tangga yang relatif kelompok menengah-atas. Selama ini kelompok miskin lebih banyak memanfaatkan sarana kredit melalui para pelepas uang yang mampu memberikan pinjaman cepat dan tanpa agunan, walaupun bunga pinjamannya tinggi.

Kata kunci: Lembaga keuangan, kelompok miskin, perdesaan Jawa.

## **THE ALTERNATIVE OF FINANCIAL INSTITUTION FOR POOR PEOPLE IN RURAL AREA**

**ABSTRACT.** This article analyzes financial problem faced by rural poor families and alternative of financial institutions that provide easy, fast, and cheap for poor people in rural Java. This research used ethnographic method, survey, and secondary data collection. In addition, this research also used in- depth interview and structured observation as part of triangulation strategy. The various of rural financial institutions, both formal and informal, is actually available in rural areas. However, such institutions has not given benefit to the poor families; these institutions are mostly accessed by middle-up group families. Many poor families in rural areas get credits from moneylenders that provide the loan quickly and without collateral, although they are charged with high interest.

Key words: Financial institutions, poor families, rural Java.

## PENDAHULUAN

Artikel ini berikhtisar pada penyediaan alternatif lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan kelompok miskin di perdesaan, dengan tata cara yang mudah, murah, dan cepat. Bukan tak mungkin, lembaga keuangan tersebut dapat memperkecil peluang kelompok miskin desa mengajukan pinjaman kepada para pelepas uang (*moneylenders*) yang memberatkan, misalnya *rentenir*. Sebenarnya sudah banyak muncul lembaga keuangan, bahkan hingga ke pelosok perdesaan. Namun mengutip istilah Krisnugraha (2002), "*water every where, but not drop every drink*". Masyarakat miskin menjadi kelompok yang tetap kesulitan memperoleh pinjaman formal.

Penelitian dilakukan di desa Wetankali, salah satu desa di Kecamatan Kutocilik, Kabupaten Banyumas. Desa Wetankali berada di tepi jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen. Wilayah desa ini terbagi menjadi tiga dusun. Data tahun 2004 menunjukkan, bahwa desa seluas 219 hektar ini dihuni sekitar 2.695 jiwa yang tercakup dalam 582 rumah tangga. Penduduk desa yang tidak memiliki mata pencaharian berjumlah sekitar 1.426 orang (84,13% dari total penduduk). Sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai buruh tani (584 orang atau 49,9%). Sementara petani penggarap berjumlah 218 orang (15,3%). Jumlah petani pemilik lahan atau mereka yang memiliki lahan cukup luas (di atas 0,5 ha) jumlahnya lebih kecil, 124 orang (sekitar 8,7%). Data jenis-jenis pencarian pokok penduduk yang diperoleh dalam penelitian di Wetankali merupakan tampilan kasar dari keragaman sumber penghidupan dalam kehidupan nyata. Karena itu masih harus diperbandingkan dengan temuan kualitatif tentang keragaman sumber penghidupan. Seseorang bisa saja memasuki lebih dari satu saluran penghidupan dalam satu waktu. Apalagi bila amatan ditujukan pada tingkat rumah tangga. Keragaman sumber penghidupan dalam suatu masa bisa antara pertanian dengan perdagangan, jasa dengan pertanian, atau pegawai negeri/tentara/polisi dengan pertanian atau perdagangan.

Berbagai kajian mengenai fasilitas keuangan mikro bagi masyarakat desa sudah banyak tersedia. Perkreditan rakyat, khususnya bagi pengusaha kecil sudah menjadi persoalan lama. Bahkan lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi penopang bantuan kredit dibalik kurang berperannya lembaga keuangan formal (Chotim & Thamrin, 1997:v ; Chotim & Handayani, 2001:11). Sorotan mengenai pentingnya penyediaan kredit mikro bagi kelompok miskin pun terus mencuat. Asumsinya, penyediaan guliran kredit mikro bagi kelompok miskin dapat memberi peluang perputaran uang dari, oleh, dan untuk rakyat miskin bersangkutan. Kondisi seperti itu terungkap dalam Semiloka "Lembaga Keuangan Mikro untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil". Salah satu kesimpulannya menunjukkan, bahwa kredit makro (yang umumnya dikelola oleh badan perbankan) cenderung digunakan kaum kapitalis sebatas untuk menyedot uang rakyat demi kepentingan kapitalis semata. Alhasil, dana dari rakyat ini pun digunakan untuk memasok kepentingan golongan ekonomi besar yang berada jauh di luar wilayah rakyat pemasok dana tersebut.

Namun demikian, maraknya model dan tata cara perkreditan tersebut tidak berarti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Masih ada lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang terus terhambat menjadi penikmat pinjaman berbentuk formal atau semi-formal tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini berupaya memberi pemahaman mengenai perkreditan mikro melalui pertanyaan utama 'adakah penyaluran kredit yang dapat diperoleh secara mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat miskin, termasuk untuk membuka atau mengembangkan kegiatan usaha kecil di perdesaan?'

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode etnografis disertai survei dengan kuesioner dan analisis data sekunder. Survei dilakukan untuk mengetahui latar sosial-ekonomi secara umum, termasuk pemanfaatan lembaga keuangan di desa. Pencarian data mengenai upaya pemenuhan kebutuhan keuangan tidak selalu dapat diperoleh melalui survei. Proses wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan pun dilakukan untuk menggali data kualitatif. Wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan wawancara sambil lalu dan penelusuran data umum rumah tangga melalui survei. Informan terpilih berasal dari berbagai rentang umur, jender, status perkawinan, maupun tingkat pendidikan. Selain itu, pengamatan terstruktur pada berbagai aktivitas sehari-hari penduduk juga dilakukan sebagai bagian dari strategi triangulasi.

Penelitian lapangannya dilakukan dalam dua tahap, masing-masing kurang lebih 30 hari. Tahap pertama dari Mei hingga Juni, dan tahap kedua dari Juli hingga Agustus 2007.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sumber-sumber Keuangan di Desa Wetankali**

Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui survei dan ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam, beberapa lembaga keuangan yang dapat ditemukan dalam penelitian di Wetankali terlihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Lembaga Keuangan di Desa Wetankali

No	Nama Institusi	Nilai Max. Pinjaman	Sistem Angsuran (Pemba- yaran)	Bunga	Lama Angsuran	Jaminan yang Diterima	Proses & Lama Penyetujuan Pinjaman	Nasabah pengguna jasa (L/P)	Penggunaan Pinjaman	Penyebab instistusi tidak bisa dijangkau orang miskin
1	BRI Unit Kecamatan	Peminjam awal sekitar Rp. 1 juta (tergantung agunan yg diberikan)	Bulanan	2 % per bulan (24% per tahun)	3 tahun	Sertifikat tanah (rumah); BPKB kendaraan	2 – 4 minggu	Laki-laki (pemilik atas nama surat-surat berharga)	Kegiatan usaha	Kelompok miskin terhambat agunan & persyaratan lainnya
2	Lembaga Keuangan Kelompok Tani	Penyewaan traktor: 300 ribu per bau	Dibayar max selesai panen musim yang sama	5 % per musim tanam	Satu musim tanam	Tanpa agunan (hanya tercatat sebagai anggota kelompok tani bersangkutan)	sekitar 1 bulan (antara panen dan musim garap berikutnya)	Laki-laki (umumnya penggarap)	Pengelolaan lahan pertanian	
		Pupuk & obat-obatan: 300 ribu per musim	Dibayar max selesai panen musim yang sama	5 % per musim tanam	Satu musim tanam	Tanpa agunan (hanya tercatat sebagai anggota kelompok tani bersandkut	Sekitar 2 minggu (penyediaan barang menunggu pesanan anggota kelompok keseluruhan).		Pengelolaan lahan pertanian	

### Saluran Keuangan Alternatif bagi Kelompok Miskin di Perdesaan (Deni Mukbar)

3	Badan Kredit Desa (BKD)	Max 1 juta (tanpa agunan)	Mingguan	3 % per bulan	12 minggu	Sertifikat rumah, BPKB, tv (pengurus meanggap sertifikat terlalu besar utk pinjaman 5 jutaan.	Max 2 minggu (tergantung persediaan dana di BKD; menggunakan sistem antri calon peminjam)	Laki-laki dan perempuan (syarat sudah menikah & ada persetujuan dari suami atau istri masing-masing)	Konsumsi; produksi; reproduksi	Kelompok miskin yg tdk memiliki penghasilan kesulitan melunasi angsuran
		> 5 juta menggunakan agunan	Bulanan	4 % per bulan	10 bulan				Konsumsi; produksi; reproduksi	
4	BPR BKK	< 500 ribu menggunakan pengantar dari desa	mingguan	20%	12 minggu	Sertifikat rumah; BPKB; izin usaha (atau penghasilan usaha, bagi pemilik usaha, misal nva	Max 2 minggu	Laki-laki	Konsumsi; produksi; reproduksi	Kelompok miskin kesulitan mengurus persyaratan dari pemerintah desa (birokrasi)

		Max. 5 juta menggunakan an agunan	bulanan	40%	3 – 12 bulan		Max 2 minggu	Laki-laki	Konsumsi; produksi; reproduksi
5	Rentenir (model yg sama terjadi pada kredit barang)	100 ribu	harian	20%	60 hari	-	Pinjaman < 1 juta langsung hari itu juga	Laki-laki dan perempuan	Konsumsi; produksi; reproduksi
				40%	70 hari	-			
				50%	90 hari	-			
				80%	180 hari	-			
			mingguan	20%	6 minggu	-			
		1 juta	harian	20%	60 hari	-	Pinjaman > 1 juta max 1 minggu		
				40%	70 hari	-			
				50%	90 hari	-			
				80%	180 hari	-			

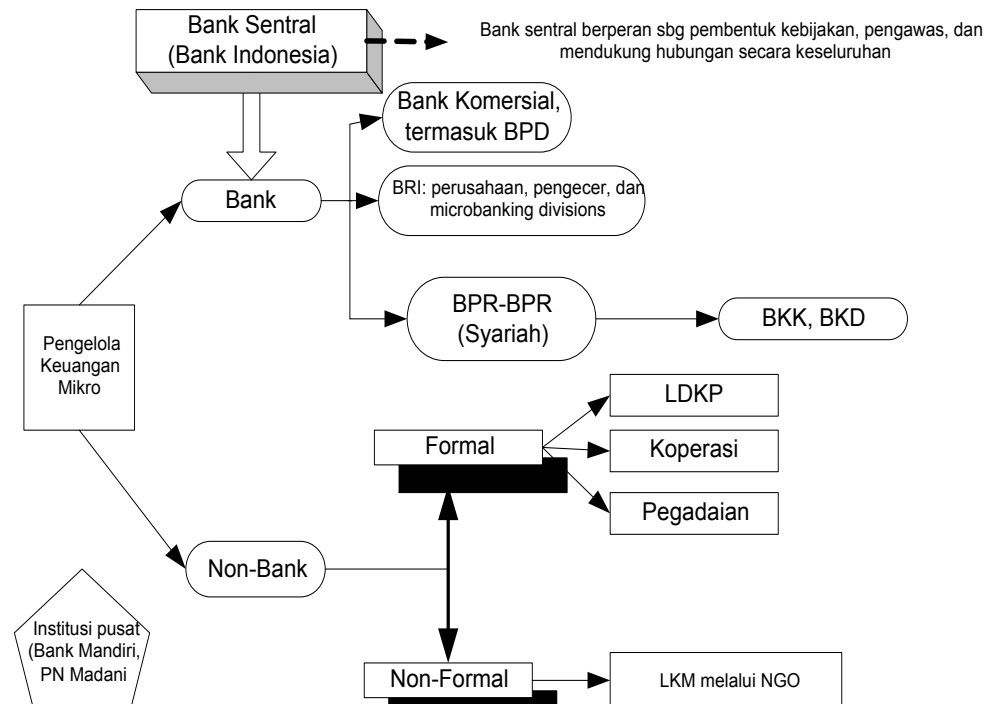
**Saluran Keuangan Alternatif bagi Kelompok Miskin di Perdesaan (Deni Mukbar)**

	(hanya tercatat sebagai anggota kelompok arisan bersangkutan)	pertemuan arisan (mingguan), uang diterima di hari yang sama.	laki-laki (kepala keluarga)	produksi; reproduksi
--	---	---	-----------------------------	----------------------

Sumber: Data Lapangan, Mei - September 2007

Data mengenai pelayanan keuangan tersebut di atas memberi pemahaman setidaknya sumber-sumber keuangan yang menyediakan berbagai model pinjaman berasal dari lembaga perbankan maupun non-bank. Bentuk-bentuk hubungan yang berlangsung dalam pelayanan keuangan desa tersebut dapat dilihat dalam Bagian 1 berikut ini.

**Bagan 1.** Hubungan Lembaga Keuangan di Indonesia



Sumber: Conroy dan Budastra (2005:4)

### Perdesaan: Keuangan dan Kemiskinan

Primahendra (2001:2-3) dan Meyer & Nagarajan (1999:25-26) melihat bahwa Kelompok miskin cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan uang dibanding kelompok golongan menengah ke atas. Uang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan: a) siklus kehidupan (melahirkan, sekolah anak, menikah, dan meninggal); b) keadaan darurat (sakit, kehilangan pekerjaan, bencana alam); serta c) memanfaatkan peluang (membayar pungutan untuk menjamin kelancaran usaha, membeli bibit tanaman baru, atau pupuk). Lebih lanjut Primahendra (2001:4) menunjukkan, bahwa kelompok miskin memenuhi kebutuhan untuk



bertahan hidup antara lain dengan cara menjual aset yang dimiliki, menggadaikan aset yang dimiliki, atau mengelola pendapatannya untuk menabung atau kredit.

Kapital menjadi wujud nyata aset untuk memutar bahkan mengembangkan kegiatan usaha. Pernyataan ini bukan berasumsi, bahwa uang satu-satunya persoalan dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu penyaluran kredit perlu disertai berbagai kegiatan lainnya, seperti pelatihan manajemen pengelolaan uang, teknis produksi, maupun pemasaran. Bentuk-bentuk pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan (pemberdayaan) agar penerima kredit dapat menggulirkan kredit berkelanjutan.

Kesulitan keuangan kelompok miskin ternyata belum mampu terpenuhi oleh berbagai lembaga keuangan formal. Mereka pun memilih mengajukan kredit melalui lembaga keuangan informal (Fafchamps & Pender, 1997, dikutip Meyer & Nagarajan 1999,:23-24; Primahendra, 2001: 1-9; Djonoto, 2005). Beberapa sumber keuangan informal menurut Asia Development Bank (dikutip Chotim & Handayani, 2001: 23), yaitu: 1) pinjaman langsung dari teman dan keluarga; 2) kredit tanpa ikatan dari pelepas uang atau pegadaian; 3) kredit terikat terkait dengan transaksi lain, seperti kredit dari pemasok bahan mentah baku atau tengkulak; dan 4) pembiayaan berkelompok.

Penelitian di Desa Wetankali menunjukkan, bahwa kebiasaan kelompok miskin mengajukan pinjaman melalui pelepas uang (rentenir). Sementara masyarakat setempat menyebutnya sebagai bank keliling atau *bank ucek-ucek*. *Sebenarnya* bentuk pinjaman dari rentenir tidak menjadi pilihan utama karena bunga pinjaman yang tinggi. Bunga berkisar antara 20-50 persen, bahkan bisa mencapai 80 persen. Perbedaan bunga ini bergantung pada pemberi pinjaman dan pemilihan lama angsuran pinjaman. Kesulitan memperoleh pinjaman secara cepat dan mudah seakan 'memaksa' meminjam ke rentenir. Di balik besarnya bunga rentenir ternyata ada 'nilai lebih' yang diperoleh peminjamnya (Adriani, 2001:34-35). Masyarakat miskin masih menganggap para pelepas uang sebagai 'dewa penolong' melalui pinjaman cepat dan mudah. Mereka tidak perlu aneka persyaratan, terutama agunan atau izin usaha. Calon peminjam perempuan pun mudah meminjam, karena tidak membutuhkan jaminan dari suami (kepala keluarga). Bahkan pelepas uang cenderung melakukan 'jemput bola' dengan mendatangi langsung peminjam.

### **LKM: Lembaga Keuangan Alternatif bagi Kelompok Miskin**

Proses transformasi ekonomi mendasar yang terjadi di perdesaan, terutama di Asia Timur dan Tenggara terjadi karena beberapa faktor, yaitu percepatan transformasi struktural ekonomi perdesaan. Gambarnya terlihat dari penurunan pertanian sebagai sektor penting di perdesaan, peningkatan penggunaan input kapital dalam produksi pertanian, ledakan pertumbuhan desa pinggiran menjadi kota kecil, serta munculnya keragaman sektor ekonomi non-pertanian perdesaan. Meyer & Nagarajan (1999:7) berasumsi perubahan tersebut dapat membuka

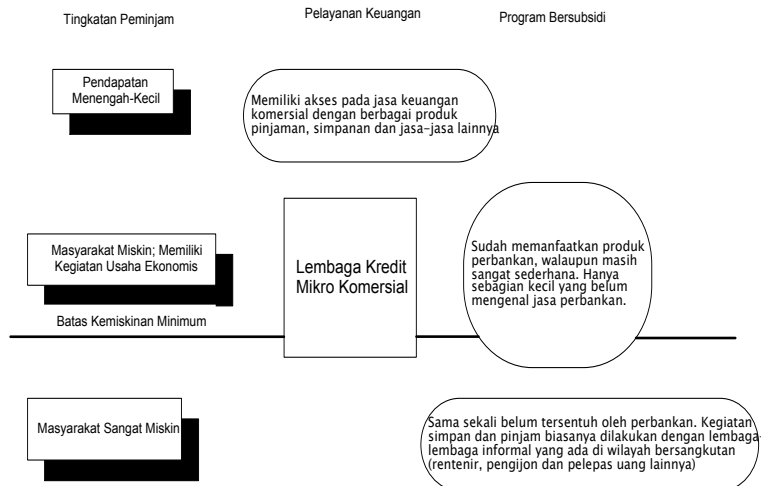
peluang pasar keuangan perdesaan, seiring peningkatan permintaan pelayanan lembaga keuangan.

Pelaksanaan *Microcredit Summit di Washington DC 1997* menunjukkan perhatian dunia terhadap kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia. Secara umum guliran kredit yang dilakukan bank-bank kecil lebih unggul dibanding kredit melalui bank-bank umum. Hasil pertemuan itu pun mendorong perluasan peran LKM sebagai strategi penting penanggulangan kemiskinan. Prospek LKM yang menguntungkan pun semakin mendorong pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya untuk mengembangkan LKM. Hal sama dipertegas Martowijoyo (2002) dan Krisnugraha (2002). Menurut mereka wujud nyata perhatian terhadap LKM di Indonesia terlihat dengan munculnya Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM) tahun 2002. Bahkan pemerintah (*c.q.* Komite Penanggulangan Kemiskinan) sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menghubungkan 10 juta kelompok masyarakat miskin dengan LKM.

Pelayanan LKM terhadap kelompok miskin dianggap mampu menggerakkan ekonomi rakyat, karena LKM menjalankan model dan cara yang telah mengakar dan tumbuh bersama perkembangan masyarakat. ADB (dikutip Chotim & Handayani 2001:23) menyebutkan LKM bisa berkembang karena dua hal, yaitu dasar kerjanya menggunakan prinsip saling kepercayaan timbal balik; serta dibangun di atas 'perasaan bersama' berdasarkan solidaritas kekeluargaan, persaudaraan, dan kemasyarakatan. Tidak salah pula Krisnamurthi (2003) berharap LKM mampu berkontribusi positif terhadap alokasi sumber daya, promosi pemasaran, dan adopsi teknologi yang lebih baik. Dengan demikian, LKM menjadi penting sebagai 'jembatan perantara' yang mampu menjalar hingga ke masyarakat tingkat bawah untuk menolong dari jurang kebutuhan keuangan, sekaligus membantu peningkatan ekonomi dan pembangunan.

Secara umum kategori pengguna jasa kredit dapat dilihat dalam bagan 2 tentang Klasifikasi Pengguna Kredit.

## Bagan 2. Klasifikasi Pengguna Kredit



Sumber Rudjito (2003; dikutip Wijono 2005: 90).

Kelompok miskin sebenarnya masih berpeluang mendapat kredit dari berbagai sumber keuangan, selain pelepas uang. Walaupun bukan pengetahuan baru, LKM dapat dianggap sebagai lembaga keuangan alternatif bagi kelompok miskin yang tidak dapat menjangkau lembaga keuangan formal. Menyitir istilah Firdaus dan Hartini (2005) LKM merupakan sumber pinjaman 'lekas saji' bagi kelompok masyarakat 'unik' yang tidak dapat menjangkau keuangan formal. Artinya, LKM merupakan sumber keuangan yang mudah dan cepat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama lapisan bawah.

Pengembangan LKM sebagai sumber keuangan masyarakat, terutama di perdesaan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Gema PKM melihat kesulitan masyarakat miskin menjangkau keuangan mikro karena kerangka hukum yang membatasi keuangan mikro, peraturan, dan pengawasan yang kurang memadai serta terus berlakunya penyaluran kredit bersubsidi untuk pengembangan kegiatan usaha secara komersial dan berorientasi pasar ([http://www.gema-pkm.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3&Itemid=1](http://www.gema-pkm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=1)).

Penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan tanpa perhitungan jelas. Hartini & Firdaus (2001:41-2) menyebut LKM sebagai konsep yang muncul berdasarkan pengalaman nyata rakyat miskin untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu, LKM seharusnya mampu

berperan sebagai pendukung pembangunan, termasuk menjadi pusat belajar dan mempraktikkan keunggulan pelatihan (*center of excellence, learning, and practice*) di desa, berfokus pada kewirausahaan dan manajemen.

Berdasarkan pemaparan di atas, LKM selayaknya mampu menjadi lembaga alternatif penampung dan penyalur kapital bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembukaan akses terhadap sumber keuangan mikro memberi peluang membuka dan meningkatkan kemampuan usaha keluarga miskin perdesaan untuk mengurangi kerentanan hidup, meningkatkan penghasilan, sekaligus menjadi sokoguru perekonomian nasional untuk mengentaskan kemiskinan.

### **Perbandingan LKM dengan *Grameen Bank***

Salah satu contoh kegiatan keuangan mikro yang memberi inspirasi dunia, adalah *Grameen Bank (GB) di Bangladesh*. Morduch (1999, dikutip Brouwer & Dijkema 2002:7) dan (Adian, 2005) melihat GB sebagai garda terdepan 'gerakan keuangan mikro'. GB menjadi bank alternatif 'berbasis-pasar' penyedia kredit di luar jalur birokrasi dan menyentuh langsung ke rumah tangga miskin atas dasar kepercayaan, bukan kontrak legal untuk menghasilkan peluang menciptakan usaha mandiri

Pemberian kredit dilakukan melalui pembentukan kelompok. Pinjaman diberikan secara berurutan setelah peminjam pertama mengembalikan pinjamannya. Selain itu, kelompok peminjam dituntut membuat pelbagai agenda sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Metodologi ini berfokus pada kemiskinan finansial dan sosial. Tujuannya untuk mendorong rasa tanggung jawab dan solidaritas sesama peminjam dalam satu komunitas.

Replika keuangan mikro GB di Indonesia dijalankan melalui program *Grameen Trust*. Beberapa lembaga penyalur kredit tersebut antara lain Yayasan Mitra Usaha (Jakarta), Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat (Jakarta), Yayasan Siti Khadijah (Semarang), dan Yayasan Pokmas Mandiri (Deli Serdang) (Sarumpaet 2005; SMERU Newsletter NO. 07/2003). Di luar jaringan tersebut, Asosiasi Perempuan Pendamping Usaha Kecil (ASPPUK) mengembangkan model kredit yang hampir sama. Pemberian kredit menjadi model pendekatan ekonomi sebagai titik masuk pembentukan kelompok perempuan usaha kecil (KPUK) yang tergabung dalam jaringan perempuan usaha kecil (JarPUK). Mukbar, dkk (2007a ; 2007b) dalam penelitian 'Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil' di Lombok Timur dan Batu Gading, Padang, mengulas banyak mengenai kegiatan pendampingan ekonomi yang difasilitasi ASPPUK melalui lembaga-lembaga pendamping lokal.

Kredit mikro bergulir tersebut terbagi menjadi kredit a) penyediaan modal, di luar lembaga keuangan formal (bank); dan b) kebutuhan khusus perempuan seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan untuk peningkatan kondisi dan posisi PUK-mikro. Kedua model ini menggunakan sistem "*tanggung-renteng*" untuk menjamin resiko terhambatnya angsuran kredit anggota.

Lembaga pendamping tidak semata-mata sebagai 'mesin uang'. Perlu tindak lanjut program kredit mikro bagi kelompok miskin, karena kemiskinan bukan

sekadar hambatan menjangkau modal finansial, tetapi juga modal sosial dan budaya. Kegiatan lanjutannya antara lain melalui proses pemberdayaan secara menyeluruh dan terprogram, antara lain melalui berbagai pelatihan *training of trainers (TOT)*, *seminar*, dan *lokakarya dengan pelbagai simulasi terhadap* anggotanya.

Pelajaran penting dalam penelitian di Desa Wetankali menunjukkan, bahwa di tingkat desa terdapat lembaga keuangan mikro yang dapat dikembangkan sebagai 'jembatan penghubung' kelompok miskin perdesaan dengan keuangan mikro, misalnya Badan Kredit Desa (BKD). Mayoritas nasabah peminjam awal BKD adalah usaha warung-warung kecil dan pedagang gendongan. Kemudian berkembang ke masyarakat lain, seperti kelompok petani. Mereka umumnya adalah petani penggarap. Sedikit sekali kaum tani pemilik. Berdasarkan wawancara lapangan, petani pemilik jarang mengajukan pinjaman karena sudah memiliki modal produksi untuk mengawali pengolahan pertaniannya. Sementara petani penggarap banyak yang menjadi nasabah peminjaman uang karena kekurangan modal produksinya. Para petani penggarap umumnya menggunakan dana kredit untuk biaya pengelolaan pertaniannya. Ada pula yang digunakan untuk kebutuhan mendadak, seperti biaya sekolah anak atau biaya kesehatan.

BKD melakukan kegiatan berdasarkan asas saling kepercayaan. Pengurus dan nasabah biasanya sudah saling kenal karena bertetangga. Aturan formal menetapkan pinjaman melebihi 1 juta rupiah perlu memberikan agunan pinjaman. Dalam praktiknya sering tidak terjadi. Artinya, model kredit yang dilakukan BKD dapat menjadi alternatif bagi kelompok miskin yang *notabene sulit menjangkau* lembaga keuangan formal, seperti bank, karena masih terhambat pada persyaratan agunan. Menurut salah seorang nasabah, BKD cenderung menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat untuk mendapat pinjaman, karena tidak bisa mendapatkan pinjaman dari unit simpan-pinjam lain di desa.

"... BKD bisa dibilang jadi tempat minjem terakhir. *Lha wong banyak* warga yang akhirnya pinjem ke BKD, karena tidak dapat pinjaman di tempat lain..." Kata salah seorang pengurus BKD (Sumber: Catatan Lapangan, Agustus 2007).

Selain itu ada pula model arisan. Sebagai lembaga tabungan kolektif yang diselenggarakan oleh banyak orang, arisan berciri utama memiliki sifat intimitas, informal, fleksibilitas para anggota serta cara-cara musyawarah dalam pemecahan permasalahan. Kelompok arisan berpotensi memperkuat usaha rakyat maupun usaha kecil secara umum sebagai alternatif pengelolaan dan pengguliran dana masyarakat lokal. Pengembangan kegiatan arisan adalah model *jibungan*, yaitu peminjaman uang dalam kelompok yang bersumber dari pemotongan uang dari pemenang arisan.

Bukan tak mungkin, melalui arisan bisa terbentuk unit peminjaman yang ditopang kerja sama dengan lembaga keuangan lebih besar. Artinya, kelompok arisan berperan sebagai institusi mediasi penyalur dana langsung ke kelompok di akar rumput. Chotim & Thamrin (1997:23) berpandangan bahwa sistem 'giliran'

pada arisan bisa dikombinasikan dengan sistem penawaran yang didukung bank untuk meningkatkan perputaran uangnya --berdasarkan kemampuan kelompok yang bersangkutan-- bisa menjadi satu alternatif penggalangan dana yang cukup potensial. Namun perlu antisipasi agar campur tangan bank dalam asosiasi seperti arisan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat tidak malah membuyarkan dan memperlemah sodalitas antar anggota kelompok. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah resiko kegagalan pemberian kredit. Salah satu kemungkinan yang dapat menghambat di kemudian hari adalah budaya kebergantungan yang masih menjadi kebiasaan dominan masyarakat kita. Sikap selalu bergantung pada pihak lain dapat menghalangi tertanamnya karakter kemandirian (*self-reliance*) dalam benak sosial masyarakat.

## KESIMPULAN

Persoalan kredit rakyat bukanlah bahasan baru, namun masih terus mengundang perdebatan, karena masih ada kelompok yang belum mampu menjangkau berbagai saluran kredit yang ada. Kredit formal tampaknya lebih banyak dinikmati rumah tangga relatif menengah-atas, seperti rumah tangga pemilik lahan luas, pedagang besar, dan pemilik toko. Sementara bagi petani gurem, buruh tani, dan pemilik warung kecil-kecilan, kredit informal dari pelepas uang relatif lebih mudah dimasuki. Meskipun telah ada lembaga keuangan semacam BKD (dalam kasus Desa Wetankali) atau *Grameen Bank* yang memungkinkan penduduk desa mendapat akses ke kredit.

Hambatan utamanya adalah kepemilikan jaminan sebagai syarat pinjaman. Sumber-sumber kredit di tingkat kecamatan pun sudah sepenuhnya bersifat pasar. Artinya, keberadaan lembaga keuangan yang disponsori pemerintah dapat dikatakan belum membantu upaya pemerataan pendapatan.

Deskripsi di atas setidaknya menunjukkan, bahwa diskusi yang perlu dilakukan tidak sebatas soal keberadaan lembaga keuangan di perdesaan. Hal terpenting adalah: adakah penyaluran kredit yang dapat diperoleh secara mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat miskin, termasuk untuk membuka atau mengembangkan kegiatan usaha kecil di perdesaan? Jawabannya tidaklah mudah. Perdebatan dapat muncul, antara menyetujui atau tidak. Namun intinya, pemberian kredit yang diarahkan untuk pengembangan usaha kecil perlu disertai dengan penguatan pelaku usaha tersebut. Jangan sampai memberi pinjaman tanpa tambahan pemahaman penggunaan dana yang diperolehnya.

Model pemberian pinjaman perlu penyesuaian dengan kondisi masyarakat setempat melalui penyusunan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan, sekaligus memperhatikan keseimbangan intervensi dan partisipasi. Harapannya, setiap rumah tangga terbuka aksesnya terhadap lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan. Lebih penting lagi adalah mengembangkan kegiatan ekonomi mandiri masyarakat miskin.

Kelompok miskin saat ini masih berkutat pada pemanfaatan pinjaman dari pelepas uang, seperti pengijon atau rentenir. Besarnya bunga pinjaman seakan

tertutup kemudahan kelompok miskin memperoleh pinjaman secara mudah dan cepat tanpa harus menunggu survei tempat tinggal atau penghitungan aset yang dimiliki. Bahkan para rentenir mampu melakukan 'jemput bola' untuk mereka mendatangi para peminjam setiap hari.

Dasar kerja 'jemput bola' tanpa persyaratan yang rumit dan cicilan harian menjadi model yang dapat dikembangkan pemberi pinjaman alternatif. Biaya operasional dan resiko 'jemput bola' setiap hari memang tetap perlu diperhitungkan. Namun, setidaknya, lembaga pemberi pinjaman alternatif dapat memperkecil besarnya bunga dibanding para rentenir. Proses pemberian pinjaman tanpa agunan menjadi pilihan yang dapat terus dikembangkan oleh lembaga keuangan. Unsur 'kedekatan' dan saling mengenal dengan peminjam menjadi hal yang perlu diperhatikan agar rasa saling percaya tetap terjaga. Lembaga penyalur yang mengetahui peminjam pun dapat berperan sebagai pendamping kegiatan usaha. Sementara pemerintah dapat menjalankan peran sebagai fasilitator untuk menjamin terlaksananya program dan menjamin kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha. Harapannya, penerima pinjaman mampu menggunakan dana pinjaman sebagai modal awal berkegiatan usaha dan mengembangkan usahanya hingga mencapai kemandirian usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pemberdayaan bagi kelompok miskin bersangkutan. Tujuannya, agar mereka dapat mengatasi sekaligus memberdayakan untuk mengentaskan kemiskinan diri dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adian, Donny Gahral. 2005. Grameen bank, bank kaum miskin.

<http://www.asppuk.or.id/berita.php?option=news&id=7012-Juli-2005>.

Adriani, S.S. 2001. Jepitan struktur dan kultur: Catatan reflektif penelitian atas lembaga keuangan mikro. Jurnal analisis sosial Vol. 6, No. 3 Desember 2001: 31-40. Bandung: Akatiga.

Anonim. 2007. Strategi nasional untuk pengembangan keuangan mikro.

[http://www.gema-pkm.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3&Itemid=1](http://www.gema-pkm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=1)

Bank Indonesia. 2005. Suku bunga bank indonesia.

<http://www.bi.go.id/web/id/Indikator+Moneter+dan+Perbankan/Suku+Bunga/>

Brouwer, A.W. dan D. Dijkema. 2002. Microfinance dilemma: The case of Bandung, Indonesia (EC 124). Groningen University Economics Science Shop.

Chotim dan Handayani 2001. LKM dalam catatan sejarah. Jurnal analisis sosial Vol. 6, No. 3 Desember 2001:11-29. Bandung: Akatiga.

Chotim dan Thamrin. 1997. Diskusi ahli pemberdayaan dan replikasi aspek finansial usaha kecil di Indonesia. Bandung: Akatiga.

Conroy, John dan I Ketut Budastra. 2005. An overview of microfinance linkages in Indonesia. *Ford foundation & rural finance group of the food and agriculture organization* (FAO).

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Press release, *No: 01/PR/I/2005* tentang pencairan tahun keuangan mikro Indonesia (TKMI) 2005. [http://www.kbri-canberra.org.au/press/press050104e\\_deplu.htm](http://www.kbri-canberra.org.au/press/press050104e_deplu.htm).

Djonoto, Sukandar. 2005. Menyiasati kredit tanpa agunan UMKM dalam kompas, Rabu 11 Mei 2005. <http://www.asppuk.or.id/artikel-isi.php?option=news&id=36>.

Firdaus, M. dan Titik Hartini. 2005. Aspek pemberdayaan perempuan di balik lembaga kredit mikro. <http://www.asppuk.or.id/artikel-isi.php?id=32>.

Hall, Nicola. 2004. Koperasi simpan pinjam di kota dan kabupaten malang. Universitas Muhammadiyah Malang, Program ACICIS (tidak dipublikasi).

Krisnamurthi, Bayu. 2003. Pengembangan keuangan mikro dan penanggulangan kemiskinan.' [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_14/artikel\\_6.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_6.htm).

Krisnugraha, Yusup. 2002. *'Notulensi seminar pendalaman ekonomi rakyat (Seri X)* tentang lembaga keuangan mikro. [http://www.ekonomirakyat.org/galeri\\_war/wartasem\\_12.htm](http://www.ekonomirakyat.org/galeri_war/wartasem_12.htm).

Martowijoyo, Sumantoro. 2002. Masa depan lembaga keuangan Mikro di Indonesia: Tinjauan dari aspek pengaturan dan pengawasan.' [www.ekonomirakyat.org/edisi\\_5/artikel\\_4.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_5/artikel_4.htm).

Meyer, R.L. dan Geetha Nagarajan. 1999. Rural financial markets in asia: Policies paradigms, and performance.' *Study of rural asia: Volume 3*. Oxford University Press.

Mukbar, D., dkk. 2007a. Pemberdayaan perempuan usaha kecil: Jalan panjang menuju keberdayaan. Studi kasus: Jaringan perempuan usaha kecil titian dampingan lembaga penelitian dan pengembangan sumber daya (LP2SD) di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bandung: Akatiga.

Mukbar, D., dkk. 2007b. Pemberdayaan perempuan usaha kecil: Jalan panjang menuju keberdayaan. Studi kasus di Batu Gadang, Padang. Bandung: Akatiga.



**Saluran Keuangan Alternatif bagi Kelompok Miskin di Perdesaan (Deni Mukbar)**

---

Primahendra, Riza. 2001. Rakyat miskin, LKM dan RUU keuangan mikro.' Jurnal analisis sosial Vo. 6, No. 3, Desember 2001:1-9. Bandung: Akatiga.

Rudjito. 2003. Peran lembaga keuangan mikro dalam otonomi daerah guna menggerakkan ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan: *Studi kasus bank rakyat indonesia*. Jurnal keuangan rakyat tahun II, Nomor 1, Maret 2003

Sarumpaet, Susi. 2005 The modified grameen bank: A sustainable financing scheme for micro enterprises in indonesia'. *Journal of asia entrepreneurship and sustainability*, Australian National University.

SMERU. 2005. Keuangan mikro di Indonesia'. Newsletter SMERU No. 13, Jan-Mar 2005.

Soesilo, Nining I. 2006. Berbondong memberi kredit UMKM'. <http://www.forumukm.com/a4.htm>, 6 November 2006

Wijono, Wiloejo W. 2005. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional: Upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan. Buletin kajian ekonomi dan keuangan, edisi khusus November 2005: 86-100 (Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan).

Widyaningrum, N. 2001. Metode evaluasi dampak kegiatan pembiayaan lembaga keuangan mikro. Jurnal analisis sosial Vol. 6, No. 3 Desember 2001: 119-129. Bandung: Akatiga.